



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM, DIREKTUR UTAMA PT  
PERTAMINA (PERSERO), KEPALA BPH MIGAS DAN KEPALA SKK MIGAS**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 1 September 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Rini Koentarti, M.Si.
Hadir Anggota	: Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas beserta jajarannya.
Acara	: 1. Distribusi BBM dan LPG 2. Pengelolaan Wilayah Kerja Migas 3. Dan lain-lain.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 1 September 2015 dibuka pukul 13.20 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara, Distribusi BBM dan LPG, Pengelolaan Wilayah Kerja Migas dan lain-lain.

**II. KESIMPULAN**

1. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas untuk membuat perencanaan terkait insentif bagi KKKS yang akan melakukan

*mt*

pengembangan Gas Non Konvensional (*Shale Gas* dan *Coal Bed Methane* (CBM)).

2. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Kepala BPH Migas untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh badan usaha (Perseroan Terbatas) yang beroperasi di sektor hilir migas sehingga beban untuk pengamanan pasokan BBM nasional tidak hanya menjadi beban PT Pertamina (Persero).
3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kepala SKK Migas Kementerian ESDM serta Kepala BPH Migas untuk meningkatkan realisasi penyerapan anggaran yang hingga saat ini masih sangat rendah.
4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Kepala BPH Migas untuk mengurangi kuota BBM bersubsidi kepada PT AKR Corporindo Tbk.
5. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Kepala BPH Migas untuk menyampaikan roadmap pembangunan SPBU/SPBE/SPBG dan kuota agen penyalur LPG se Indonesia.
6. Komisi VII DPR RI meminta jawaban tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan Anggota Komisi VII, dan diserahkan kepada Sekretariat Komisi VII pada tanggal 7 September 2015

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 17.00 WIB

Jakarta, 1 September 2015

**DIRJEN MIGAS  
KEMENTERIAN ESDM RI**



**Prof. IGN WIRATMAJA PUJA**

**KETUA RAPAT,**



**Ir. H. MULYADI**